

Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa

The History of the Indonesian Women's Movement in the 19-20 Century: A Historical Review of the Role of Women in National Education

Silvy Mei Pradita ✉

✉ Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail: praditasilvy@uhamka.ac.id ✉

Diterima: 01 November 2020

| Direvisi: 13 November 2020

| Diterbitkan: 16 November 2020

ARTICLE INFO

Keywords:

History of the Women's Movement, National Education, Role.

Kata Kunci:

Sejarah Pergerakan Perempuan, Pendidikan Bangsa, Peran.

ABSTRACT

The discourse on the role of women never ends up talking. Women as actors in domestic work or their roles in the public sphere are not long debated, become discussions everywhere. One of them is about the women's movement. A movement created by women activists whose task is to promote the position of women. Step by step taken by women figures on the trajectory of history proves that Indonesian women have truly laid the foundation of women in the name of social justice. This research aims to make the understanding of history as the foundation for women who are active today in fighting for social and political rights. The research method used is the historical method. The result is that the movement of women from the end of the 19th century to the most recent one has been fluctuating or tidal. The strong waves raised by female figures in voicing women's rights in all fields were born from gender injustice. Therefore, Indonesian women leaders have given an example, women today have the responsibility to continue the struggle.

Diskursus mengenai peran perempuan tidak pernah habis dibicarakan. Perempuan sebagai aktor pekerjaan domestik ataupun perannya di ruang publik tidak usang diperdebatkan, dijadikan wacana diskusi di mana-mana. Salah satunya mengenai pergerakan perempuan. Gerakan yang diciptakan para aktivis perempuan secara mendasar bertujuan untuk mengangkat posisi perempuan. Langkah demi langkah yang dilakukan para tokoh perempuan pada lintasan sejarah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bersungguh-sungguh meletakkan dasar pergerakan perempuan atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan pemahaman sejarah sebagai landasan pergerakan perempuan di masa sekarang dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis. Hasilnya adalah pergerakan perempuan sejak akhir abad 19 sampai yang paling mutakhir bersifat fluktuatif atau pasang surut. Gelombang kembang yang diembuskan para tokoh perempuan dalam menyuarkan hak perempuan dalam segala bidang lahir dari ketidakadilan gender. Maka dari itu, para tokoh perempuan Indonesia telah mencontohkan, perempuan hari ini punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan.

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai peran perempuan tidak pernah habis dibicarakan. Perempuan sebagai

aktor pekerjaan domestik ataupun perannya di ruang publik tidak usang diperdebatkan, dijadikan wacana diskusi di mana-mana. Hal tersebut membuktikan bahwa banyak pihak, mulai dari intelektual, aktivis LSM, hingga penggiat gerakan perempuan masih terus menggaungkan keterlibatan, keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam berbagai ranah strategis kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya perjuangan dan pergerakan yang dilakukan baik oleh gerakan perempuan ataupun oleh mereka yang memiliki *concern* dalam isu perempuan membuktikan bahwa masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan gender.

Sejarah bangsa merekam dengan baik setiap detail pergerakan sosial yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh perempuan. Peran mereka, para tokoh perempuan tersebut, sejatinya menjadi peletak dasar perjuangan perempuan untuk memiliki hak yang sama di ruang publik. Perempuan memiliki peran dalam berbagai bidang kehidupan, tidak stagnan dalam satu aspek saja. Dengan kata lain, lintas bidang dalam bingkai pembangunan manusia, hampir seluruhnya digarap oleh kaum perempuan. Pergerakan politik, ekonomi, sosial dan budaya, diambil dengan sempurna oleh para tokoh sejarah perempuan. Dalam hal yang lebih khusus, perempuan memiliki andil besar dalam pendidikan bangsa. Bahwa dalam setiap bidang kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, ataupun kesetaraan gender itu sendiri, semuanya memiliki esensi yang sama, yaitu perjuangan pendidikan bangsa. Perempuan sebagai insan secara kodrati ataupun konstruksi sosial diberi label “pendidik”, suatu gelar yang secara otomatis didapatkan perempuan. Di

Indonesia, yang ada hanyalah “bahasa ibu”, tidak ada “bahasa ayah”, hal tersebut menyiratkan bahwa seorang ibu, atau lebih luas perempuan, memiliki peran yang besar dalam proses pendidikan.

Dalam artikel ini, peneliti berusaha mengungkap perbedaan penggunaan kata antara ‘perempuan’ dengan ‘wanita’ dari perspektif linguistik sebagai upaya memahami sejarah pergerakan perempuan Indonesia dari hal yang paling mendasar. Setelah itu, pemaparan rentetan momen sejarah dengan memotret peristiwa-peristiwa besar yang dilahirkan para tokoh pergerakan perempuan pada masanya, yakni akhir abad 19 sampai abad 20. Pembahasan dibatasi hanya pada masa pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, hingga Orde Lama. Pasca Orde Lama, suara masyarakat sipil dibungkam. Pada era Reformasi, gerakan perempuan tetap ada dan lahir dengan ciri khas dan coraknya masing-masing.

Dalam masyarakat, penggunaan kata ‘perempuan’ dan ‘wanita’ kerap dipertukarkan. Definisi kata dan makna yang terkandung di dalamnya berkembang sesuai budaya kemasyarakatan. Dahulu, wanita memiliki arti yang agung, luhur, dan biasa digunakan sebagai nama lembaga atau organisasi, seperti *Persatuan Wanita Republik Indonesia* (Perwari), *Gerakan Wanita Indonesia* (Gerwani), dan *Dharma Wanita*. Seiring berjalannya waktu, kata perempuan lebih lazim digunakan, khususnya dalam nomenklatur organisasi, seperti *Komite Pembela Kaum Buruh Perempuan Indonesia*, *Komnas Perempuan*. Perubahan penggunaan sekaligus perkembangan pemaknaan pada kedua kata tersebut berpengaruh terhadap

penutur alias bangsa Indonesia menempatkan perempuan dalam setiap ruang kenegaraan. Menurut Kuntjara (2001), kata *perempuan* dan *wanita* memang lazim digunakan secara bergantian dalam bahasa Indonesia. Kata *wanita* dahulu dianggap sebagai lebih mulia daripada *perempuan*, sedangkan *perempuan* bermakna peyoratif. Akan tetapi, kata *perempuan* kini justru lebih sering digunakan daripada *wanita*. Kata ini sangat populer terutama di kalangan aktivis gerakan perempuan.

Gerakan yang diciptakan para aktivis perempuan secara mendasar bertujuan untuk mengangkat posisi perempuan. Langkah demi langkah yang dilakukan para tokoh perempuan pada lintasan sejarah membuktikan bahwa perempuan Indonesia bersungguh-sungguh meletakkan dasar pergerakan perempuan atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal tersebut terbukti berhasil membangun karakter sosial atas situasi kaum perempuan dan mendapatkan pengakuan. Gerakan pembebasan perempuan merupakan gerakan yang heterogen dengan berbagai teori dan pandangan politik yang berbeda (McDonald, 2001).

Tujuan penelitian dibagi ke dalam dua cakupan: teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian bertujuan memperkaya literasi bangsa tentang sejarah perjuangan pergerakan perempuan Indonesia. Selain itu, tentu sebagai bahan referensi yang relevan dan bersifat mutakhir bagi para akademisi atau peneliti yang hendak mengkaji isu perempuan dan sejarah gerakan sosial yang melingkupinya. Sementara secara praktis, penelitian bertujuan menjadikan

pemahaman sejarah sebagai landasan pergerakan perempuan di masa sekarang dalam memperjuangkan hak-hak sosial dan politik. Dengan begitu, napas perjuangan akan terus panjang, karena ditopang oleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah dan landasan pergerakan yang relatif sama dan hanya berdinamika: kesetaraan gender.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan historis. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan (Kuntowijoyo, 2003): (1) Heuristik, proses mencari dan menelusuri sumber-sumber data yang diperlukan. Sumber data didapatkan dari studi kepustakaan melalui buku dan artikel jurnal; (2) Kritik, metode dalam memverifikasi keabsahan dari data yang sudah didapat; (3) Interpretasi, penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang didapatkan melalui sumber data; (4) Historiografi, penulisan sejarah secara sistematis dan kronologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

‘Perempuan’ dan ‘Wanita’ dari Perspektif Linguistik-Historis

Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat biasa menggunakan kata ‘perempuan’ atau ‘wanita’ ketika hendak menyebut satu gender tersebut. Pandangan penutur secara umum tentu menyamakan arti dan makna kedua kata tersebut. Sejatinya, bahasa tidaklah bebas nilai. Bahasa selalu dilingkupi kepentingan tertentu. Ia lahir dan berkembang di masyarakat dan memuat konstruksi sosial pada setiap kata. Konstruksi tersebut membangun persepsi pada setiap benak manusia, kemudian digunakan

dalam keseharian tanpa mempertanyakan lebih jauh makna yang terkandung di dalamnya.

Mengapa ada 'perempuan' dan 'wanita'? Bagaimana penggunaannya di ruang publik dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi pergerakan perempuan? Dalam upaya memahami pergerakan perempuan secara holistik, diperlukan nalar kritis yang hendak menginterupsi dan mengevaluasi setiap jengkal fenomena perempuan yang terjadi. Termasuk dalam hal bahasa. Bahasa merupakan hal paling fundamental yang perlu dipahami setiap aktivis perempuan ataupun akademisi-intelektual, agar tidak terjebak pada pergerakan tataran praktis tetapi luput memahami tataran teoretis.

Pada masa awal kemerdekaan (1945-1949), nama wanita lebih menjamur digunakan organisasi-organisasi perempuan. Di antaranya adalah Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) (Blackburn, 2004). Tidak berhenti pada masa tersebut, tetapi berlanjut pada masa Demokrasi Terpimpin (1958-1965) dan Orde Baru (1966-1998). Contohnya adalah Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Dharma Wanita. Ketika kata 'wanita' pada awalnya lebih populer digunakan dalam organisasi-organisasi tersebut, setali tiga uang, kata 'perempuan' pun jamak digunakan. Perbedaan terletak pada makna yang dikonstruksi dan digunakan pada 'perempuan'. Kata 'perempuan' lebih mengindikasikan kesan pergerakan keperempuanan yang berani mendobrak kemapanan. Hal itu dapat terasa pada nama-nama organisasi pergerakan perempuan yang lebih memilih menggunakan 'perempuan' daripada 'wanita': Asosiasi Perempuan

Indonesia untuk Keadilan (APIK), Solidaritas Perempuan, Komite Pembela Kaum Buruh Perempuan Indonesia, dan Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (Blackburn, 2004). Lebih dari itu, sejarah mencatat sebenarnya 'perempuan' sudah lebih dahulu digunakan pada organisasi perempuan, yaitu Perserikatan Perkoempoelan Perempoean Indonesia (PPPI) (Jupriono, 1997).

Wanita mengandung konotasi yang terhormat sebagai buah dari proses ameliorasi. Dengan kata lain, 'wanita' memiliki perubahan makna menjadi lebih positif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kata turunannya, yaitu 'kewanitaan'. Kewanitaan berarti sifat-sifat yang khas pada wanita. Layaknya seorang wanita di keraton, 'kewanitaan' berasosiasi dengan karakter yang lembut, lemah gemulai, patuh, santun, patuh, tunduk (Jupriono, 1997). Pada saat yang bersamaan, ketika kata 'wanita' diasosiasikan dengan kepribadian yang lemah dan patuh, berarti pula 'wanita' jauh dari karakter keras, memberontak, berani, tangguh, menantang, dan melawan. Oposisi nilai atau karakter yang terkandung pada kata 'wanita' itulah yang dimiliki 'perempuan'. Perempuan justru mengalami proses peyorasi yang berarti perubahan makna menjadi tidak baik, bernuansa negatif. Hal tersebut dapat tergambar dari fenomena sejarah yang sarat akan pengaruh kebahasaan, yaitu 'perempuan' termakan oleh 'wanita' dalam tubuh birokrasi pada saat Orde Baru. Terbukti penggunaan nama organisasi *Dharma Wanita* yang merupakan kumpulan istri pegawai negeri sipil. Hal tersebut dimaksudkan agar perempuan tidak bar-bar, diam, dan patuh pada kuasa laki-laki. Di samping itu, yang lebih masyhur adalah

penggunaan ‘wanita’ dalam setiap label profesi perempuan pada masa itu, seperti Menteri Peranan Wanita, peran wanita dalam pembangunan, insinyur wanita. Karakter perempuan yang bernilai luhur dibunuh secara semantis oleh pembumian penggunaan kata ‘wanita’. Padahal, secara etimologis, perempuan memiliki arti yang sangat tinggi. Perempuan berasal dari kata *empu* yang berarti tuan, orang yang mahir, hulu, yang paling besar (Jupriono, 1997).

Masa kini kaum perempuan sudah tercerahkan. Kata ‘perempuan’ merebak di setiap sendi kehidupan, mulai dari kursi dewan, eksekutif, hingga tataran akar rumput organisasi buruh perempuan juga kementerian yang ada pada organisasi mahasiswa. Perjuangan pergerakan perempuan semakin nyata dan karena itu pula peran perempuan dalam membangun pendidikan bangsa semakin besar. Ketika peran perempuan dilemahkan, walau hanya dengan penggunaan kata, hal tersebut berpengaruh besar. Konstruksi sosial yang menempel pada setiap kepala manusia Indonesia, seperti yang telah dilakukan di era Orde Baru adalah bangunan persepsi psikologis yang kokoh. Maka dari itu, pemahaman kebahasaan dari perspektif komparasi historis menjadi penting diketahui, dalam hal ini tentu terkait ‘perempuan’ dan ‘wanita’.

Pesan Pendidikan dalam Setiap Pergerakan Perempuan

Pergerakan perempuan dari masa ke masa di Indonesia bisa diterjemahkan sebagai gerakan yang konsisten. Konsistensi itu lahir sebagai bentuk perjuangan atas reaksi terhadap segala bentuk stereotip, stigma, dan

ketidakadilan kepada perempuan. Walau perjuangan tersebut bersifat pasang surut, kepastian mengenai keadaan ketidakadilan perempuan dalam ruang publik bersifat mutlak. Adanya estafet perjuangan dari satu fase waktu ke fase waktu selanjutnya merupakan wujud keseriusan yang ditempuh para tokoh perempuan. Di bawah ini merupakan tokoh ataupun gerakan perempuan yang menjadi pelopor di setiap momentum kesejarahan. Dalam setiap pergerakan perempuan yang berlangsung, sorotan utama selain perjuangan dengan motif keadilan itu sendiri adalah pesan pendidikan dari setiap pergerakan. Lebih dari itu, peran di setiap pesan itu dapat teraktualisasikan dalam pendidikan perempuan bangsa hingga hari ini.

1. Raden Ajeng Kartini

Seorang tokoh perempuan yang sering dianggap sebagai peletak dasar perjuangan perempuan Indonesia ini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya ialah Raden Mas Adipati Sosroningrat, seorang Bupati Jepara. Raden Ajeng Kartini berdiri tidak hanya sebagai tokoh, tetapi juga tokoh yang monumental. Keberaniannya melampaui perempuan pada masanya, maka tak heran jika ia dinilai sebagai pelopor yang menegakkan tonggak perjuangan perempuan.

Isu atau perjuangan yang disuarakan oleh Kartini terhimpun rapi dalam surat-suratnya yang kemudian dibukukan: *Habis Gelap Terbitlah Terang* (1963). Isi surat-suratnya seputar perlawanan dan kritik sosial atas kesewenang-wenangan yang dilakukan golongan laki-laki pada saat itu. Kartini

memprotes keras kawin paksa (pernikahan yang dipaksakan kepada seorang perempuan, padahal belum pernah mengenal lelaki yang hendak menikahinya, bahkan belum pernah melihat batang hidungnya sama sekali), poligami (pada saat itu sudah menjadi hal yang biasa ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, dan semua istri tersebut tinggal dalam rumah yang sama), perceraian dengan tanpa alasan yang jelas, tradisi seorang perempuan ketika sudah dewasa harus dipingit (diam di rumah) dan baru boleh keluar rumah setelah bersuami, dan kurangnya akses pendidikan terhadap perempuan.

Dalam konsep Kartini, perkawinan haruslah berlandaskan cinta antara kedua insan. Dengan kata lain, proses pengenalan mutlak harus terjadi sebelum berlanjut pada perkawinan. Apabila ada paksaan, terlebih hal tersebut dilakukan pada perempuan yang pada saat itu tidak memiliki kuasa karena konstruksi sosial yang berlaku, maka itu adalah kejahatan suatu hubungan interpersonal. Perempuan ibarat peliharaan yang dipaksa kawin. Kartini pun mengkritik keras praktik poligami yang dilakukan banyak laki-laki pada masa itu. Terlepas dogma agama yang mengungkung hal tersebut, moralitas berkata ketika para perempuan itu tinggal dalam satu rumah, ditambah tidak didukung dengan fasilitas yang memadai, maka hal itu hanyalah pemaksaan hawa nafsu yang tidak disertai dengan kemampuan. Perempuan tidak merdeka karena diharuskan tunduk dan patuh ketika ada orang yang memininang. Hal tersebut merupakan perpanjangan kasus dari tradisi

pingitan: suatu kebiasaan perempuan dewasa tidak boleh keluar apabila belum memiliki suami. Ketika perempuan dewasa tidak boleh keluar rumah, seketika ada seorang laki-laki yang mempersunting atas nama cinta palsu kemudian dijadikannya perempuan itu istri kedua atau ketiga, yang ada bukanlah kebebasan, melainkan kenestapaan.

Sejumlah pesan yang Kartini suratkan secara eksplisit menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang dapat membuat kaum perempuan merdeka dan berdikari adalah pendidikan. Pendidikan yang memiliki fungsi memerdekakan dan memartabatkan menjadi satu-satunya alat yang harus dikuasai perempuan untuk melawan penindasan yang selama ini ditujukan kepadanya. Dengan belajar, kaum perempuan akan terdidik, tercerahkan, dan tercerdaskan. Menjadi manusia seutuhnya yang bebas memilih pilihan hidup berdasarkan pertimbangan akal budi. Maka dari itu, atas keresahan dan segenap permasalahan yang menimpa kaum perempuan, Kartini fokus pada pendidikan sebagai solusi dari ketidakadilan.

Kartini merupakan salah seorang dari sedikit perempuan Indonesia yang memperoleh pendidikan Barat. Meskipun hanya memperoleh pendidikan tingkat *Elementary School*, yaitu *Europesche Lagere School*, namun Kartini telah dapat menguasai bahasa Belanda sehingga ia memiliki modal pengetahuan yang cukup untuk berhubungan dengan dunia modern. Komunikasinya dengan teman-temannya di Eropa dilakukan lewat surat-menyurat dalam bahasa Belanda. Beberapa surat yang terkumpul dalam

bukunya pun dilayangkan kepada sahabat-sahabatnya yang orang Belanda.

Keadaan perempuan pada masa Kartini tidaklah sebebaskan keadaan perempuan di zaman sekarang. Pada masa itu budaya feodal masih sangat kuat berkembang di masyarakat. Dengan adanya budaya feodal itulah kebebasan maupun pemikiran perempuan tidak ada artinya. Keberadaan perempuan tenggelam di antara keberadaan laki-laki. Perempuan sepenuhnya patuh dan tunduk di bawah kekuasaan para kaum laki-laki. Hal ini terungkap dalam surat Kartini kepada Nona Zeehandelaar tanggal 25 Mei 1899:

Kami, gadis-gadis masih terantai kepada adat Istiadat lama, hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya sudah berumur dua belas tahun, lalu saya ditahan di rumah saya mesti masuk "tutupan"; saya dikurung di dalam rumah seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi, bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami... (Kartini, 1963).

Perkawinan merupakan awal kesengsaraan bagi kaum perempuan Indonesia. Dalam surat kartini yang dikirimkan kepada nona Zeehandelaar pada tanggal 25 Mei 1899 menggambarkan kawin adalah azab, berikut kutipan surat Kartini:

Dan kawin disini, aduh, dinamakan azab sengsara masih terlalu halus! Betapa nikah itu tiada akan sengsara, kalau hak

semuanya bagi keperluan laki-laki saja dan tiada sedikit juapun bagi perempuan? Kalau hak dan pengajaran kedua-duanya bagi laki-laki semata-kalau semuanya dibolehkan dia perbuat? Cinta, apakah yang kami ketahui tentang perkara cinta itu? Betapa kami akan mungkin sayang akan seorang laki-laki dan seorang laki-laki kasih akan kami, kalau kami tiada berkenalan bahkan yang seorang tiada boleh melihat yang lain? Anak gadis dan anak muda dipisahkan benar-benar... (Kartini, 1963).

Kartini menaruh perhatian yang luar biasa pada pendidikan perempuan. Hal tersebut menjadi landasan paling mendasar pergerakan perempuan Indonesia dari dulu hingga kini. Kartini merumuskan lima konsep pendidikan perempuan (Sastroatmodjo, 2005):

1. Perempuan merupakan tempat pendidikan pertama. Secara kodrati memiliki rahim yang menjadi sumber kelahiran seorang insan, maka manusia pertama yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik adalah perempuan.
2. Perempuan merupakan pembawa peradaban. Dalam salah satu suratnya, Kartini menulis: "Dari semenjak dahulu kemajuan perempuan itu menjadi pasal yang paling penting dalam usaha memajukan bangsa. Kecerdasan pikiran penduduk Bumiputra tiada akan maju dengan pesatnya, bila perempuan itu ketinggalan dalam usaha itu. Perempuan jadi pembawa peradaban!".
3. Pendidikan itu mendidik budi dan jiwa. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya bertugas memberikan pencerahan bagi intelektualitas, tetapi juga satu paket lengkap dengan emosionalitas.

4. Pendidikan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan untuk kemajuan bangsa. Dalam membangun kesatuan kehidupan berbangsa, maka hal paling fundamental adalah menata peradaban dengan pendidikan. Hal tersebut akan terwujud apabila pendidikan antara kaum laki-laki dan perempuan setara, agar tujuan yang hendak dicapai akan lebih mudah dicapai karena terdapat kerja sama dan harmonisasi.
5. Pendidikan untuk cinta tanah air. Dalam satu suratnya, Kartini menulis:

Kami sekali-kali tiada hendak menjadikan murid-murid kami jadi setengah orang Eropa, atau orang Jawa kebelanda-belandaan. Maksud kami dengan mendidik bebas, ialah terutama sekali akan menjadikan orang Jawa itu, orang Jawa yang sejati, orang Jawa yang berjiwa karena cinta dan gembira akan tanah air dan bangsanya, yang senang dan gembira melihat kebagusan, bangsa dan tanah airnya, dan ... kesukarannya.

2. Poetri Mardika

Keterlibatan kaum perempuan pada abad ke-20 di mulai dengan berdirinya organisasi perempuan. Organisasi perempuan pada masa tersebut memiliki gagasan yang membuat kaum perempuan sadar bahwa peningkatan derajat untuk kaum perempuan sangatlah penting. Corak dari perkumpulan gerakan perempuan pada masa sebelum kemerdekaan bersifat fokus kepada perbaikan kedudukan perempuan hingga berkembang untuk meningkatkan hak pendidikan terhadap perempuan (Manilet-Ohorella, Sutjiatiningih, & Ibrahim, 1992).

Pada tahun 1912, dibentuk organisasi perempuan yang bernama Poetri Mardika,

organisasi ini merupakan organisasi perempuan pertama di Batavia dan memiliki kontribusi yang cukup aktif dalam menggerakkan memajukan taraf kehidupan perempuan dan organisasi ini mendapatkan dukungan serta bantuan dari Budi Utomo yang menekankan pada bidang pendidikan serta kebudayaan (Vreede-de Stuers, 2008). Poetri Mardika merupakan organisasi yang bertujuan memberikan motivasi kepada perempuan pentingnya meningkatkan taraf hidup para perempuan baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial (Suryokhondro, 1984). Poetri Mardika mencita-citakan kemajuan terhadap perempuan agar tidak lagi menjadi perempuan yang hanya terpaksa mengikuti adat istiadat saja, melainkan sebagai perempuan diharuskan aktif dalam meningkatkan derajat mereka. Berikut ini kutipan dalam surat kabar yang ditulis oleh Rahardjo mengenai kemajuan yang dicita-citakan oleh Poetri Mardika: "...Adapoen maksoed kemadjoewan itoe kalau tiada salah, jaitoe: menoentoet segala kepandaian kala bisa menoentoet kepandaiannya lain bangsa, setidak-tidaknja sendiri bisa semporna soedah baik dan bagoes" (Rahardjo, 1917).

Sebagai organisasi perempuan pertama, Poetri Mardika memiliki sejumlah agenda yang berjalan demi mewujudkan cita-cita mereka. Di antaranya adalah: Pertama, memberikan wacana emansipasi perempuan melalui surat kabar. Poetri Mardika memiliki surat kabar yang bernama sama seperti nama organisasi mereka. Artikel yang mereka publikasikan digagas langsung oleh

para anggota. Tulisan-tulisan yang tersebar berisi tentang perasaan, pikiran, dan keresahan yang dimiliki para perempuan anggota Poetri Mardika. Pada keberlangsungan publikasi surat kabar tersebut, Poetri Mardika tidak hanya memuat tulisan perempuan, mereka pun menerima tulisan laki-laki yang mendukung emansipasi perempuan. Kedua, Poetri Mardika memberikan beasiswa. Sejak awal Poetri Mardika sadar bahwa yang menyebabkan ketidakadilan yang menimpa perempuan adalah karena keterbelakangan pendidikan. Beasiswa pendidikan diluncurkan sebagai upaya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar bisa berdaya. Semangat membangun perempuan melalui pendidikan yang digelorkan oleh Poetri Mardika merupakan perpanjangan napas R.A. Kartini yang sebelumnya sudah meletakkan batu pertama perjuangan pendidikan perempuan Indonesia.

Dua hal yang dilakukan Poetri Mardika menjelaskan bahwa mereka menggarap isu pendidikan perempuan secara serius. Mendirikan surat kabar yang isinya fokus terhadap pengembangan wawasan dan literasi perempuan adalah suatu hal yang luar biasa. Selain itu pula, tidak hanya bertujuan menyebarkan wacana, tetapi membangun kapabilitas anggota untuk menulis. Memberikan beasiswa pendidikan adalah hal paling konkret dalam mewujudkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagai organisasi pendidikan perempuan pertama, Poetri Mardika sukses menyemai benih perjuangan pendidikan perempuan.

Pergerakan Poetri Mardika tersebut menghasilkan dampak yang tidak sederhana, yaitu membukakan akses kepada perempuan untuk merasakan nikmatnya kucuran ilmu pengetahuan dalam proses pendidikan. Apabila dirumuskan, peran maupun kontribusi Poetri Mardika adalah sebagai berikut (Yanti, 2020):

1. Poetri Mardika menjadi inisiator bagi organisasi perempuan lainnya yang hadir setelah Poetri Mardika. Organisasi ini juga melakukan sosialisasi dengan mengadakan kegiatan kongres-kongres di berbagai daerah sehingga menjadikan Poetri Mardika semakin kuat jaringannya dengan perhimpunan-perhimpunan lainnya.
2. Poetri Mardika berupaya memberikan pengajaran kepada masyarakat luas, terutama perempuan, yang dapat membangkitkan semangat pembaruan, keterbukaan, dan nasionalisme melalui surat kabar yang diterbitkannya. Surat kabar ini berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan perempuan sekaligus menjadi sarana yang memudahkan para perempuan ataupun masyarakat lainnya dalam mentransmisikan misi-misi Poetri Mardika. Surat kabar yang terbit pada tahun 1900-an ini juga berperan aktif sebagai media sosialisasi Poetri Mardika kepada masyarakat. Dalam surat kabar tersebut, misalnya berisi salah satu bentuk dukungan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan serta pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, masalah pendidikan campuran antara laki-

laki dan perempuan, serta pemberian kelonggaran untuk bergerak bagi kaum perempuan di tengah era kolonialisme Belanda.

3. Poetri Mardika mencoba untuk menanamkan kesadaran terhadap perempuan dalam meraih pendidikan contohnya adalah para anggota Poetri Mardika itu sendiri yang kerap kali mendongkrak wacana akan pentingnya pendidikan di tengah masyarakat. Alasan utama atau alasan pokok kaum perempuan ingin mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki tidak lain adalah kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak diperlakukan adil untuk mengekspresikan diri mereka dalam menerima pendidikan.
4. Poetri Mardika meningkatkan upaya penegakan keadilan serta hak asasi perempuan dalam kehidupan. Hal ini dilakukan dengan cara membantu para perempuan untuk keluar dari kungkungan adat seperti poligami, pernikahan anak di bawah umur, sistem nyai, sistem selir, ataupun kawin paksa.

3. Gerakan Perempuan Daerah

Setelah berdirinya Poetri Mardika, pada tahun-tahun berikutnya berbagai organisasi ataupun perkumpulan bermunculan, baik yang didukung oleh organisasi laki-laki maupun yang terbentuk secara mandiri oleh perempuan sendiri, misalnya Pawiyatan Wanito (Magelang, 1915), Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun - PIKAT (Manado, 1917), Purborini (Tegal, 1917), Aisyiyah atas bantuan Muhammadiyah (Yogyakarta, 1917),

Pradita, 2020, Sejarah Pergerakan Perempuan ...

Wanita Soesilo (Pemalang, 1918), Wanita Hadi (Jepara, 1919), Poteri Boedi Sedjati (Surabaya, 1919), Wanita Oetomo dan Wanita Moeljo (Yogyakarta, 1920), Serikat Kaoem Iboe Soematra (Bukit Tinggi, 1920), Wanita Katolik (Yogyakarta, 1924) (Wieringa, 1998). Secara keseluruhan organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Namun, pada intinya setiap organisasi perempuan saat itu bertujuan untuk dapat memperbaiki posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatkan pendidikan perempuan sebagai sebuah strategi dasar (Soetjipto, 2005).

Di Sumatera berdiri organisasi pergerakan wanita antara lain KAS (Kerajinan Amai Setia) yang didirikan tahun 1914, Keutamaan Istri di Medan, Istri Sumatera, PARMU (Partai Muslimin Indonesia) Bagian Istri, Persatuan Istri Andalas, dan sebagainya. Di Sulawesi berdiri organisasi-organisasi wanita antara lain PIKAT (Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya) di Manado tahun 1917, Sarekat Rukun Istri di Makassar, dan sebagainya. Di Kalimantan berdiri organisasi Wanita Kencono. Di Bali berdiri organisasi Perukunan Istri Denpasar.

Selanjutnya, ada Isteri Sedar yang didirikan pada tahun 1930 di Bandung oleh Suwarni Pringgodigdo. Isteri Sedar adalah organisasi perempuan yang aktif dalam perjuangan politik. Dalam kongresnya tahun 1932, Isteri Sedar menyatakan diri ingin meningkatkan status perempuan Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Ide dasarnya adalah bahwa tidak akan ada persamaan hak antara laki-laki dan

perempuan bila tidak ada kemerdekaan, “Hanya Indonesia yang merdeka oleh usaha besar-besaran kaum laki-laki dan perempuan yang bersatu padu yang akan sanggup memberikan persamaan hak dan tindakan kepada rakyat Indonesia” (Arivia, n.d.).

4. Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)

Gerwani merupakan kelanjutan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1950 di Semarang (Diniah, 2007). Gerwani merupakan organisasi perempuan yang menginginkan agar perempuan bisa mandiri, berdikari, berdaya, dan bekerja keras daripada bergaya hidup santai dan memiliki orientasi hidup untuk kekayaan, namun tetap terkungkung. Gerwani juga sangat menentang perempuan yang menjadi pengikut suami dalam tindakannya atau hanya sebagai embel-embel suami. Pada tahun 1955, Gerwani ingin melakukan serangkaian kegiatan yang berbeda, yakni Gerwani mulai menitikberatkan perhatiannya pada pemilu 1955. Ketika kampanye pemilu dimulai, Gerwani memutuskan untuk ambil bagian dan mendukung kampanye untuk para calon PKI, namun tidak mengajukan nama-nama calonnya sendiri, walaupun Gerwani mendapat kebebasan politik tertentu. Hampir sebanyak 23.480 orang anggota Gerwani ikut di dalam kegiatan kampanye pemilu 1955 ini (Wieringa, 1998).

Gerwani terafiliasi dengan PKI. Oleh karena itu, pergerakan yang mereka lakukan sangat keras dan terkesan radikal. Gerwani kerap melakukan protes berupa tuntutan dan desakan kepada pemerintah dengan

melakukan aksi-aksi massa. Sejumlah aksi demonstrasi dan advokasi dilakukan Gerwani ketika terdapat hal-hal yang membuat rakyat kecil terjepit. Walaupun begitu, pergerakan yang pro rakyat dan keadilan membuat Gerwani menjadi organisasi perempuan yang besar di Indonesia. Gerwani menjadi bukti sejarah bahwa demokrasi Indonesia yang masih tertatih memberikan ruang kebebasan bagi perempuan untuk berekspresi dan mengeksplorasikan dirinya.

Pada tahun 1964, Gerwani mulai mencanangkan program-program kerja guna mengembangkan dirinya dalam suasana politik yang semakin memanas. Program-program itu meliputi: hak-hak wanita; hak-hak anak; hak-hak demokrasi; kemerdekaan nasional yang penuh; dan perdamaian.

a. Hak-hak Wanita

Program kerja pertama dan utama dalam Gerwani adalah mengenai masalah hak-hak wanita. Hak-hak wanita yang menjadi program kerja Gerwani meliputi persamaan hak dengan laki-laki dalam politik, hak perlindungan perkawinan, hak memilih kewarganegaraan dalam perkawinan campuran, hak wanita jika menjadi janda, hak wanita kaum buruh, hak wanita dalam tata pemerintahan, hak kesehatan, hak untuk turut melaksanakan *land reform*. Paling tidak terdapat 22 program Gerwani yang memperhatikan masalah hak-hak wanita.

b. Hak-hak Anak

Titik perhatian kedua dalam program kerja Gerwani adalah mengenai hak-hak anak. Kehidupan anak sangat erat dalam

rangkaian peran wanita dan dalam hal ini adalah ibu. Gerwani memandang hak-hak anak tidak dapat dilepaskan dari hak-hak wanita. Hak-hak anak dalam program Gerwani misalnya hak anak untuk bebas dari buta huruf, hak anak untuk mendapat pendidikan, hak anak untuk mendapatkan hiburan yang tidak bersifat cabul dan propaganda perang.

c. Hak Demokrasi, Kemerdekaan Nasional yang Penuh, dan Perdamaian

Gerwani memperhatikan hak-hak wanita dalam demokrasi, perdamaian, dan kemerdekaan. Misalnya hak untuk turut serta dalam usaha pembebasan Irian Barat.

Gerwani hidup pada tahun 1950-1965. Setelah Gerakan 30 September 1965 meletus, Gerwani musnah. Peran Gerwani berakhir seiring dengan penghancuran terhadap PKI dan tumbanganya pemerintahan Sukarno setelah peristiwa pada malam 30 September 1965. Sejarah organisasi perempuan yang berhasil membentuk pandangan politik perempuan sebagai "ibu militan" berakhir tragis. Kelompok militer dan kaum konservatif yang tidak menyukai sepak terjang Gerwani di ranah politik dan terancam oleh militansinya melakukan rekayasa yang sangat keji dengan membalikkan posisi moral Gerwani untuk menciptakan imaji-imaji mengenai Gerwani sebagai "organisasi yang bejat moral". Simbol-simbol mengenai seks liar dan kastrasi digunakan untuk memberangus keberanian perempuan, kemandirian sosial politik, dan otonominya; menyisakan

bencana panjang sejarah perempuan di Indonesia. Pemerintah militer Orde Baru yang pro-modal berhasil menghilangkan Gerwani dari sejarah gerakan perempuan (Soyomukti, 2009).

Agenda-agenda yang dimiliki dan telah dilakukan Gerwani memberikan pesan pendidikan sosial-politik yang penting bagi kaum perempuan. Bahwa perempuan bisa melibatkan dirinya secara langsung dalam ranah pengambilan kebijakan. Setidak-tidaknya pendapatnya di ruang publik didengar dan mendapatkan tempat, tidak ditutup mulut dan dijadikan 'peliharaan' di rumah seperti zaman sebelumnya. Asumsi bahwa perempuan jauh lebih emosional sehingga tidak cocok apabila berkarya di ranah pemerintahan tertolak, karena terbukti perjuangan, advokasi, dan serangkaian aktivitas aktivisme yang sarat akan nalar kritis ternyata berhasil dilakukan oleh perempuan, dan hal itu dicontohkan oleh Gerwani.

KESIMPULAN

Mengurai sejarah perjalanan perjuangan pergerakan perempuan Indonesia membuahkan satu kesimpulan yang akan senantiasa diperbarui. Bahwa pergerakan perempuan sejak akhir abad 19 sampai yang paling mutakhir bersifat fluktuatif atau pasang surut. Gelombang kencang yang diembuskan para tokoh perempuan dalam menyuarkan hak perempuan dalam segala bidang lahir dari

ketidakadilan gender. Perlakuan dan penyikapan terhadap perempuan yang jauh dari kata kemanusiaan membuat geram para perempuan yang telah lebih dahulu mengenyam pendidikan. Ketidakadilan yang ada, penindasan yang terjadi, dan akses yang tertutup bagi perempuan merupakan buah dari ketidaktahuan, kebodohan. Sejak awal R.A. Kartini telah fokus pada pengembangan sumber daya manusia perempuan dari segi kecerdasan intelektual. Bahwa pendidikan mampu membuat manusia menjadi tercerahkan, dan konsekuensi atas hal tersebut adalah berupa penghargaan, apresiasi, penghormatan dari orang lain. Pendidikan menjadi alat sekaligus tameng ketika kesewenang-wenangan berpotensi terjadi. Dengan nalar yang kritis, perasaan yang berbudi pekerti, perempuan dapat menangkis sekian banyak kemungkinan pengungkungan pada dirinya.

Setiap gerakan perempuan yang pernah tertoreh dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, seluruhnya fokus pada isu pendidikan. Isu pendidikan dalam arti luas, layaknya Gerwani yang fokus pada pendidikan dan praktik sosial politik, tidak hanya seperti Poetri Mardika yang benar-benar menenggelamkan diri pada kerja-kerja pendidikan. Pergerakan perempuan yang tertangkap dengan baik oleh sejarah bangsa tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia pernah mengalami fase krisis keadilan pada perempuan, dan hal tersebut harus menjadi acuan pergerakan perempuan Indonesia hari ini. Demokrasi telah berjalan sekian lama, namun praktik ketidakadilan dalam versi dan bentuk yang berbeda selalu mungkin terjadi. Maka dari

itu, para tokoh perempuan Indonesia telah mencontohkan, perempuan hari ini punya tanggung jawab melanjutkan perjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arivia, G. (n.d.). *Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan*. Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/256761246/Soekarno-Dan-Gerakan-Perempuan>
- Blackburn, S. (2004). *Women and the state in modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Diniah, H. (2007). *Gerwani bukan PKI: sebuah gerakan feminisme terbesar di Indonesia*. ÇarasvatiBooks.
- Jupriono, S. D. (1997). *Betina, Wanita, Perempuan: telaah semantik leksikal, semantik historis, pragmatik*. Online.
- Kartini, R. A. (1963). *Habis gelap terbitlah terang / Raden Adjeng Kartini; terdjemahan Armijn Pane (A. Pane 1908- & R. A. Kartini 1879-1904. Habis gelap terbitlah terang, Eds.)*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Kuntjara, E. (2001). Gender in Javanese Indonesian. *Impact: Studies in Language and Society*, 199.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Manilet-Ohorella, G. A., Sutjiatiningsih, S., & Ibrahim, M. (1992). *Peranan wanita Indonesia dalam masa pergerakan nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai
- Mcdonald, L. (2001). Feminisme dan Sosialisme. *Australia: Resistance Book*.
- Rahardjo. *Wellevenbeid Bagian I. Poetri Mardika*. , Pub. L. No. 10, 103 (1917).
- Sastroatmodjo, S. (2005). *Tragedi Kartini / Suryanto Sastroatmodjo*. Yogyakarta: Narasi.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik perempuan bukan gerhana: esai-esai pilihan / [Ani Widayani Soetjipto]*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soyomukti, N. (2009). *Perempuan di mata*

Soekarno / Nurani Soyomukti. Yogyakarta:
Garasi.

Suryokhondro, S. (1984). *Potret pergerakan wanita di Indonesia / Sukanti Suryochondro; diterbitkan untuk Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial* (Y. I.-I. Sosial, Ed.). Jakarta: Rajawali.

Vreede-de Stuers, C. (2008). *Sejarah perempuan Indonesia: gerakan dan pencapaian / Cora Vreede-de Stuers*. Depok: Komunitas Bambu.

Wieringa, S. (1998). *Kuntilanak Wangi: Organisasi-organisasi Indonesia sesudah 1950*. Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.

Yanti, R. D. (2020). Potret Gerakan Perempuan pada Abad Ke 20 di Batavia: Poetri Mardika 1912. *Historia: Jurnal Pendidikan Dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 135–144.